

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

- a. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi di wilayah Polisi Resor Kota Padang, tindakan yang pertama dilakukan oleh pihak kepolisian adalah tindakan preventif (pencegahan) dan selanjutnya dilanjutkan kepada tindakan represif (penindakan).
- b. Hambatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di wilayah Polisi Resor Kota Padang, yakni, pertama dirasa masih kurangnya kuantitas sumber daya manusia yaitu sedikitnya jumlah penyidik, kedua faktor sarana dan prasarana kurang memadai, ketiga sulitnya mengungkap barang bukti, dan keempat tempat pembelian dan penjualan transaksi penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi jenis solar berpindah-pindah.
- c. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi di wilayah Polisi Resor Kota Padang adalah melengkapi sarana dan prasarana yang ada, membina hubungan yang harmonis dan kekeluargaan terhadap masyarakat,

membentuk tim khusus untuk memata-matai tempat yang sering dijadikan sebagai tempat tempat oknum penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi.

B. Saran

- a. Kepada Kepolisian Resor Kota Padang khususnya kepada penyidik yang dalam hal ini adalah penegak hukum yang berada di wilayah Kota Padang agar tegas dan secepatnya menanggulangi penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi yang ada di wilayah Kepolisian Resor Kota Padang dan dalam prosesnya agar mengedepankan kepentingan penyidikan, yaitu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Perkembangan teknologi zaman yang sangat cepat saat ini akan berpengaruh juga pada perkembangan jenis dan pola kejahatan. Tindak pidana penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi pun sebagai tindak pidana yang konvensional yang sudah begitu dikenal. Dengan demikian, alangkah baiknya perlu dilakukan hal-hal yang dapat membuat penegak hukum menjangkau kejahatan penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi dalam model, pola, dan modus apapun.
- c. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Dalam hal ini perlunya peran penuh dari masyarakat untuk membantu pihak Kepolisian.